



PAUD di Ujung Negeri : Tantangan Akreditasi dan Keadilan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Nias

Nelly Agustina

STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

nelly.kaknelly@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Akreditasi PAUD berperan sebagai instrumen penjaminan mutu untuk memastikan layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan Standar Nasional. Namun, pelaksanaan akreditasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan akreditasi PAUD serta isu keadilan mutu pendidikan anak usia dini di wilayah 3T Nias. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, catatan lapangan, wawancara informal, dan dokumentasi selama pelaksanaan tugas profesional peneliti sebagai asesor akreditasi PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan PAUD di wilayah 3T Nias menghadapi keterbatasan akses geografis, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya pendidik, serta praktik pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Selain itu, standar akreditasi yang bersifat seragam belum sepenuhnya mencerminkan keadilan mutu ketika diterapkan pada satuan PAUD dengan keterbatasan ekstrem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan afirmatif, pendampingan pra-akreditasi, serta pendekatan akreditasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan bagi PAUD di wilayah 3T.

Kata Kunci: PAUD, akreditasi, wilayah 3T, keadilan mutu, Nias

Abstract

Early Childhood Education (ECE) is a fundamental foundation for the development of quality human resources. ECE accreditation serves as a quality assurance mechanism to ensure that early childhood education services comply with national standards. However, the implementation of accreditation in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) areas faces complex challenges. This study aims to describe the challenges of ECE accreditation and the issue of equity in early childhood education quality in the 3T areas of Nias. This research employed a descriptive qualitative approach using field observations, field notes, informal interviews, and documentation collected during the author's professional duties as an ECE accreditation assessor. The findings reveal that ECE institutions in the 3T areas of Nias experience severe geographical constraints, limited facilities and infrastructure, insufficient qualified educators, and learning practices that are not fully aligned with early childhood developmental principles. Furthermore, uniform accreditation standards have not fully reflected educational equity when applied to ECE institutions with extreme limitations. This study recommends the implementation of affirmative policies, pre-accreditation assistance, and a more contextual and equitable accreditation approach for ECE institutions in 3T areas.

Keywords: early childhood education, accreditation, 3T areas, educational equity, Nias

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada fase ini, anak berada pada masa emas (*golden age*) yang sangat menentukan perkembangan kognitif, sosial-emosional, bahasa, moral, dan fisik motorik. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD yang bermutu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Negara melalui berbagai kebijakan telah menetapkan standar nasional PAUD sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan berkeadilan. Salah satu instrumen penjaminan mutu pendidikan adalah akreditasi. Akreditasi PAUD bertujuan untuk menilai kelayakan dan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Melalui akreditasi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan, pembinaan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akreditasi belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi riil satuan PAUD yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah 3T memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat berbeda dengan wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, ketersediaan sumber daya manusia, serta minimnya pendampingan pendidikan menjadi persoalan klasik yang masih terus dihadapi. Kondisi ini berdampak langsung pada mutu penyelenggaraan PAUD, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kualifikasi pendidik, hingga praktik pembelajaran yang belum sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini.

Pulau Nias merupakan salah satu wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang tinggi. Beberapa satuan PAUD di wilayah ini berada di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai, melewati jalan tanah, serta tebing-tebing terjal yang membahayakan. Kondisi tersebut tidak hanya mempersulit akses peserta didik ke sekolah, tetapi juga menyulitkan pendidik, pengawas, serta asesor akreditasi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Realitas ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PAUD di Nias tidak dapat dilepaskan dari konteks keterbatasan wilayah 3T. Pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi PAUD di wilayah Nias memperlihatkan potret nyata ketimpangan layanan pendidikan anak usia dini. Beberapa satuan PAUD hanya melaksanakan pembelajaran dua hingga tiga hari dalam satu minggu. Proses pembelajaran masih didominasi oleh kegiatan membaca dan menulis menggunakan pulpen, yang kurang sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini yang seharusnya berbasis bermain. Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan pendidik, melainkan juga oleh keterbatasan pelatihan, pendampingan, serta minimnya dukungan kebijakan yang kontekstual. Dalam konteks tersebut, akreditasi sering kali dipersepsikan sebagai beban administratif bagi satuan PAUD di wilayah 3T, bukan sebagai instrumen pembinaan mutu. Standar nasional yang bersifat seragam dihadapkan pada realitas lapangan yang penuh keterbatasan, sehingga menimbulkan dilema antara tuntutan profesionalisme dan rasa keadilan. Hal ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap pelaksanaan akreditasi PAUD, khususnya di daerah-daerah yang berada di ujung negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tantangan pelaksanaan akreditasi PAUD di wilayah 3T Nias serta mengkaji isu keadilan mutu pendidikan anak usia dini dalam konteks keterbatasan geografis dan sumber daya. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan pendekatan akreditasi PAUD yang lebih adil, humanis, dan kontekstual bagi wilayah tertinggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Pulau Nias. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks, pengalaman lapangan, serta makna di balik fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD dan proses akreditasi di daerah terpencil. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa satuan PAUD yang berada di wilayah 3T di Pulau Nias. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik wilayah yang sulit dijangkau, kondisi geografis ekstrem, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Subjek penelitian meliputi satuan PAUD yang menjadi objek akreditasi, pendidik PAUD, serta kepala satuan pendidikan yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan akreditasi.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini sekaligus sebagai asesor akreditasi PAUD. Posisi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi satuan PAUD, proses pembelajaran, serta realitas pelaksanaan akreditasi di lapangan. Untuk menjaga objektivitas, peneliti melakukan refleksi kritis dan pencatatan sistematis terhadap setiap temuan selama proses akreditasi berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut: Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi geografis satuan PAUD, sarana prasarana, aktivitas pembelajaran, serta lingkungan belajar anak usia dini. Berlokasi di Paud Harenoro, kecamatan Lahusa, Nias Selatan, yang mencakup pengalaman peneliti selama perjalanan menuju lokasi PAUD, proses visitasi akreditasi, serta interaksi dengan pendidik dan pengelola satuan PAUD. Dilakukan dengan pendidik dan kepala satuan PAUD untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, keterbatasan yang dihadapi, serta persepsi mereka terhadap proses akreditasi. Dokumentasi, berupa dokumen pendukung akreditasi, foto kondisi satuan PAUD, serta catatan administratif yang relevan dengan pelaksanaan standar PAUD.

Teknik pengumpulan data melibatkan tiga tahapan utama (Arikunto, 2019; Sugiyono, 2020), yaitu: Pertama, observasi; dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait klasifikasi keadaan fakta. Sebelum observasi, peneliti melakukan persiapan dengan merancang pertanyaan, langkah-langkah, dan poin-poin yang diamati. Kedua, wawancara; dilakukan untuk memahami informasi secara mendalam, khususnya dari pendidik Paud Harenoro, untuk mengungkap masalah-masalah yang dianggap kompleks. Ketiga, studi dokumen; dilakukan melalui observasi arsip-arsip yang ada untuk menjadi bukti akurat kejadian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya dilakukan pula analisis data melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan yang mengacu

pada teori (Huberman & Saldana, 2014). Dengan kombinasi metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang temuan lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi riil satuan PAUD di wilayah 3T Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian satuan PAUD yang berada di wilayah 3T Nias memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat terbatas. Untuk mencapai lokasi satuan pendidikan, peneliti harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi jalan yang tidak memadai, menyeberangi sungai, serta melewati jalur sempit di tebing-tebing terjal. Kondisi geografis tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan layanan PAUD, baik dari sisi kehadiran peserta didik, konsistensi pembelajaran, maupun kunjungan pembinaan dari pihak terkait. Akses yang sulit tidak hanya memengaruhi peserta didik dan pendidik, tetapi juga berdampak pada keterbatasan supervisi dan pendampingan pendidikan. Situasi ini memperkuat temuan bahwa tantangan geografis merupakan faktor dominan yang menyebabkan ketimpangan mutu PAUD antara wilayah 3T dan daerah yang lebih mudah dijangkau.



Gambar 1.
Sungai di desa Boronadu Kec. Gomo Nias Selatan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di beberapa satuan PAUD wilayah 3T Nias belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Kegiatan belajar mengajar pada satuan PAUD yang diobservasi hanya dilaksanakan selama dua hingga tiga hari dalam satu minggu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pendidik, kondisi geografis, serta rendahnya dukungan operasional. Selain itu, proses pembelajaran masih didominasi oleh kegiatan membaca dan menulis menggunakan pulpen. Pendekatan pembelajaran berbasis bermain, eksplorasi, dan stimulasi perkembangan anak belum diterapkan secara optimal. Praktik pembelajaran tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman pendidik terhadap konsep pembelajaran PAUD yang berorientasi pada kebutuhan dan tahap perkembangan anak.



Gambar : 2.
Internalisasi pembelajaran secara konvensional pada kebutuhan anak

Hasil observasi juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana satuan PAUD di wilayah 3T Nias masih sangat terbatas. Beberapa satuan pendidikan belum memiliki ruang belajar yang layak, alat permainan edukatif, serta media pembelajaran yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana sebagian pendidik belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar pendidik PAUD. Minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pendidik menyebabkan praktik pembelajaran berjalan secara konvensional dan berorientasi pada hasil akademik semata. Padahal, pembelajaran PAUD seharusnya menekankan proses, pengalaman belajar, serta pengembangan karakter dan sosial-emosional anak.

Akreditasi PAUD di wilayah 3T Nias menghadirkan tantangan tersendiri. Standar nasional yang bersifat seragam dihadapkan pada realitas lapangan yang penuh keterbatasan. Dalam kondisi tersebut, akreditasi kerap dipersepsikan sebagai beban administratif yang sulit dipenuhi oleh satuan PAUD, alih-alih sebagai sarana pembinaan mutu. Peneliti sebagai asesor dihadapkan pada dilema antara tuntutan profesionalisme dalam menilai ketercapaian standar dan empati terhadap kondisi riil satuan pendidikan. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan akreditasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan, khususnya bagi satuan PAUD yang berada di wilayah tertinggal dan terpencil.



Gambar 3:
Penyerahan surat Tugas Akreditasi Paud Harapan Desa Sarahiliza

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keadilan mutu pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya terwujud di wilayah 3T Nias. Anak-anak PAUD di wilayah ini belum memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses memadai. Keadilan mutu tidak dapat dimaknai sebagai keseragaman standar semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks geografis, sosial, dan budaya setempat. Oleh karena itu, kebijakan akreditasi PAUD perlu diarahkan tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen afirmatif yang mendorong pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas satuan PAUD di wilayah 3T.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Pulau Nias masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kontekstual. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi faktor utama yang memengaruhi mutu layanan PAUD. Akses yang harus melalui sungai, jalan tanah, serta tebing terjal tidak hanya menyulitkan peserta didik dan pendidik, tetapi juga membatasi intensitas pembinaan, supervisi, dan pendampingan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa aksesibilitas wilayah merupakan determinan penting dalam pemerataan mutu pendidikan (Arikunto, 2019; Sugiyono, 2020). Praktik pembelajaran yang masih didominasi oleh kegiatan membaca dan menulis menggunakan pulpen menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pembelajaran PAUD dan realitas di lapangan. Pembelajaran PAUD seharusnya berorientasi pada bermain sambil belajar, eksplorasi, serta stimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Namun, keterbatasan pemahaman pendidik, minimnya pelatihan, serta tekanan administratif akreditasi mendorong pendidik menerapkan pendekatan pembelajaran yang bersifat akademik formal. Kondisi ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa satuan PAUD di wilayah 3T cenderung mengadaptasi praktik pembelajaran sekolah dasar karena kurangnya pendampingan pedagogis yang berkelanjutan.

Keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualifikasi pendidik turut memperkuat ketimpangan mutu layanan PAUD. Standar nasional PAUD yang mensyaratkan ketersediaan ruang belajar layak, alat permainan edukatif, serta pendidik berkualifikasi sering kali sulit dipenuhi oleh satuan PAUD di wilayah 3T. Dalam konteks ini, kesenjangan mutu tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya komitmen satuan pendidikan, melainkan oleh ketimpangan dukungan struktural dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada wilayah tertinggal. Pelaksanaan akreditasi PAUD di wilayah 3T Nias memperlihatkan dilema antara tuntutan pemenuhan standar dan prinsip keadilan mutu. Standar akreditasi yang bersifat seragam cenderung kurang sensitif terhadap konteks keterbatasan ekstrem yang dialami satuan PAUD di daerah terpencil. Akibatnya, akreditasi sering dipersepsikan sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen pembinaan mutu. Temuan ini menguatkan urgensi pendekatan akreditasi yang lebih kontekstual, di mana proses penilaian tidak hanya berfokus pada ketercapaian dokumen dan indikator formal, tetapi juga pada upaya, proses, dan potensi pengembangan satuan PAUD.

Keadilan mutu pendidikan anak usia dini dalam konteks wilayah 3T tidak dapat dimaknai sebagai keseragaman capaian standar, melainkan sebagai pemberian perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan akreditasi PAUD perlu dilengkapi dengan kebijakan afirmatif, seperti pendampingan pra-akreditasi, pelatihan intensif bagi pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, akreditasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi dan penguatan mutu PAUD di wilayah tertinggal.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Pulau Nias menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses geografis, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya pendidik, serta praktik pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Kondisi geografis yang ekstrem, seperti harus menyeberangi sungai dan melewati jalur tebing yang sulit, berdampak langsung terhadap konsistensi pembelajaran dan kualitas layanan PAUD. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran yang hanya berlangsung dua hingga tiga hari dalam satu minggu serta dominasi kegiatan membaca dan menulis menunjukkan bahwa PAUD di wilayah 3T masih berada dalam kondisi yang memerlukan pendampingan serius.

Akreditasi PAUD yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penjaminan dan peningkatan mutu, dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjawab realitas lapangan satuan PAUD di wilayah 3T. Standar nasional yang bersifat seragam belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan mutu pendidikan anak usia dini ketika diterapkan pada satuan PAUD dengan keterbatasan ekstrem. Hal ini menimbulkan dilema bagi asesor dalam menyeimbangkan tuntutan profesionalisme dan empati terhadap kondisi riil satuan pendidikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan afirmatif bagi PAUD di wilayah 3T, khususnya dalam bentuk pendampingan intensif, bantuan sarana prasarana, serta peningkatan akses infrastruktur pendidikan.
2. Sistem akreditasi PAUD perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial satuan pendidikan, tanpa mengabaikan prinsip mutu dan perlindungan hak anak.
3. Pendampingan pra-akreditasi perlu diperkuat, terutama bagi satuan PAUD di wilayah terpencil, agar akreditasi tidak hanya menjadi proses penilaian administratif, tetapi juga sarana pembinaan berkelanjutan.
4. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis konteks lokal perlu menjadi prioritas, sehingga praktik pembelajaran dapat beralih dari pendekatan akademik formal menuju pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.
5. Kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan, perlu diperkuat untuk memastikan terpenuhinya keadilan mutu pendidikan anak usia dini di wilayah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAN PAUD dan PNF. (2020). *Pedoman Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. (2021). *Kebijakan Peningkatan Mutu PAUD di Daerah 3T*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Suyadi & Ulfah, M. (2017). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2015). *Education for All: Reaching the Marginalized*. Paris: UNESCO Publishing.